

**EVALUASI KINERJA KEUANGAN PUBLIK:
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA BOSP
DI KOTA KEDIRI 2023**

Maharani Putri Wahyu Rahmawati^{1*}, Eva Hany Fanida^{2*}, Revienda Anita Fitrie^{3*}.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Sosial Dan Politik,
Universitas Negri Surabaya

Email : 25040674096@mhs.unesa.ac.id, evafanida@unesa.ac.id, reviendafitrie@unesa.ac.id

ABSTRACT

The Educational Unit Operational Assistance (BOSP) fund is crucial in supporting regional education quality. However, challenges in absorption optimization and reporting accountability frequently occur. This research aims to evaluate public financial performance, specifically analyzing the effectiveness, efficiency, and accountability of BOSP fund management in Kediri City. Utilizing a descriptive qualitative approach with a library research method, data collection focused on secondary official documents (Kediri City's Budget Realization Report, Supreme Audit Agency's Audit Report, Regional Education Balance Sheet) and SINTA-accredited journals (2021-2026). Data were analyzed using content analysis and policy comparison. The synthesis results indicate that the efficiency level of BOSP budget absorption in Kediri City is generally running well. Nevertheless, the effectiveness of educational outputs needs alignment to match the disbursed funds. Regarding accountability, macro governance is good, but the implementation of digital reporting via the ARKAS application at the school level still faces technical server issues and treasurer human resource constraints. This potentially hinders real-time reporting transparency.

Keywords : BOSP Fund; Public Financial Performance; Accountability; ARKAS Application; Kediri City.

ABSTRAK

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sangat krusial dalam mendukung kualitas pendidikan di daerah. Namun, tantangan optimalisasi penyerapan dan akuntabilitas pelaporan masih kerap terjadi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja keuangan publik, khususnya menganalisis efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dana BOSP di Kota Kediri. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode library research, pengumpulan data difokuskan pada dokumen resmi sekunder (LRA Kota Kediri, LHP BPK, Neraca Pendidikan Daerah) dan literatur jurnal SINTA (2021-2026). Data dianalisis melalui

content analysis dan komparasi kebijakan. Hasil sintesis data menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penyerapan anggaran BOSP di Kota Kediri secara umum berjalan baik. Meski demikian, efektivitas capaian output pendidikan perlu diselaraskan agar sebanding dengan besaran dana. Pada aspek akuntabilitas, tata kelola makro terpantau baik, namun implementasi pelaporan digital via Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) di tingkat sekolah masih terkendala isu teknis server dan kapasitas SDM bendahara. Hal ini berpotensi menghambat transparansi pelaporan real-time.

Kata Kunci: Dana BOSP; Kinerja Keuangan Publik; Akuntabilitas; Aplikasi ARKAS; Kota Kediri.

Latar Belakang

Menggagas pembangunan suatu negara tidak akan pernah utuh jika hanya bertumpu pada kalkulasi angka matematis, terutama ketika berbicara tentang pendidikan yang menjadi denyut nadi peradaban. Di dalam ruang-ruang kelas itulah, masa depan dan cita-cita generasi penerus bangsa mulai disemai. Berpijak pada urgensi tersebut, amanat konstitusi menetapkan porsi dua puluh persen dari pengeluaran negara secara khusus untuk menopang hak belajar anak-anak Indonesia. Di wilayah Kota Kediri, wujud nyata dari komitmen tersebut direpresentasikan melalui kucuran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Pembiayaan ini diproyeksikan sebagai instrumen krusial untuk melumasi roda operasional sekolah, sehingga kegiatan transfer ilmu dapat berlangsung secara terhormat dan optimal. Kendati demikian, menunaikan amanah anggaran publik bukanlah perkara sederhana. Tolok ukur keberhasilan fiskal tidak semestinya berhenti pada jargon *Value for Money* atau besarnya persentase dana yang terserap, melainkan harus dibuktikan lewat seberapa dalam kemanfaatan tersebut menyentuh realitas ekosistem pembelajaran.

Secara administratif, postur keuangan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri pada tahun anggaran 2023 patut mendapat apresiasi atas performanya yang luar biasa. Jika ditinjau dari kacamata kuantitatif, daya serap dana operasional ini menunjukkan rekam jejak yang sangat impresif. Rincian pencapaian tersebut dapat dicermati melalui penjabaran data berikut:

Tabel 1.1: Realisasi Anggaran Dana BOSP Kota Kediri Tahun 2023

Jenjang Pendidikan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Sekolah Dasar (SD)	24,815,420,000	24,567,265,800	99.00%
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	15,240,350,000	15,164,148,250	99.50%
PAUD & Pendidikan Kesetaraan	4,450,230,000	4,316,723,100	97.00%
TOTAL	44,506,000,000	44,048,137,150	98.97%

Sumber: Data diolah dari Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendidikan Kota Kediri 2023 (Estimasi).

Merujuk pada paparan data di atas, tingkat penyerapan yang mencapai rata-rata 98,97 persen melukiskan potret keberhasilan yang nyaris tanpa cela. Akan tetapi, di balik gemilangnya angka tersebut, tersimpan sebuah realitas paradoksal yang cukup pelik di lapangan. Transformasi digital memaksa institusi pendidikan untuk beralih menggunakan sistem pelaporan terpadu semacam ARKAS. Niat awal aplikasi ini untuk merawat kejujuran dan akuntabilitas publik sering kali justru melahirkan beban mental tersendiri. Di balik layar monitor, para guru yang merangkap sebagai pengelola keuangan harus memeras keringat menghadapi kendala infrastruktur teknis dan keterbatasan kecakapan digital. Pada akhirnya, tingginya angka serapan tersebut kerap kali merupakan imbas dari tekanan psikologis dan perjuangan para bendahara sekolah yang harus berpacu dengan tenggat waktu kaku, di sela-sela tumpukan kewajiban utama mereka sebagai pendidik.

Atas dasar ironi inilah, riset ini digagas untuk menakar ulang efektivitas dan efisiensi penyaluran dana BOSP agar lebih beriringan dengan kapasitas insani para pelaksananya. Evaluasi ini tidak ditujukan untuk sekadar merayakan kesuksesan kuantitatif yang telah dibukukan, melainkan untuk menguak rintangan operasional dan psikologis yang terbungkus rapi di balik deretan laporan hijau tersebut. Dengan menyelami dinamika pelik para pekerja pendidikan ini, kajian ini berupaya merumuskan rekomendasi tata kelola yang taat pada regulasi sekaligus berjiwa humanis. Tujuan esensial dari penelitian ini adalah mewujudkan ekosistem birokrasi keuangan publik di Kota Kediri yang benar-benar efisien—sebuah kondisi di mana penegakan integritas sistem pelaporan tidak lagi merampas ketenangan kerja tenaga kependidikan, sehingga dana BOSP mampu memberikan dampak yang jauh lebih berkualitas bagi keberlangsungan dunia pendidikan.

Tinjauan Pustaka

Konsep Kinerja Keuangan Publik dan *Value for Money*

Keberhasilan lembaga pemerintahan dalam menata aset keuangan secara hati-hati demi kemajuan inisiatif pembangunan tergambar pada metrik sukses pengaturan fiskal negara (Halim, 2016). Berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 perihal Mekanisme Keuangan Publik, verifikasi sukses telah berganti dari pengawasan batasan pengeluaran ke model *Value for Money*, yang dibedah menjadi trio 3E: *Economy* (pemanfaatan hemat dana), *Efficiency* (harmoni sumber-keluaran), serta *Effectiveness* (manifestasi hasil konkret). Di medan birokrasi publik, strategi ini esensial untuk mengamplifikasi dampak tiap aliran dana terhadap fasilitas umum warga.

Harmonisasi Efektivitas dengan Pengoptimalan dalam Administrasi Dana

Derajat efektivitas diukur lewat bandingan output riil dengan standar yang difiksasi, yang mengilustrasikan pemenuhan visi institusi secara keseluruhan (Mardiasmo, 2018). Secara spesifik di bidang pengajaran, parameter ini diekstrak dari indeks pemanfaatan alokasi dana, yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \left(\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \right) \times 100\%$$

Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, indeks yang mendekati kesempurnaan atau mencapai puncak (100%) mengisyaratkan kualitas sukses tingkat tinggi. Lebih lanjut, efektivitas tidak berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan pengoptimalan, yaitu taktik memaksimalkan hasil dari minimisasi sumber daya yang tersedia (Tyler, 2019). Proses evaluasi pengoptimalan ini melibatkan perhitungan varians antara biaya acuan standar dan biaya yang benar-benar terjadi, dengan persamaan matematis:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \left(\frac{\text{Biaya Standar per Unit Output}}{\text{Biaya Aktual per Unit Output}} \right) \times 100\%$$

Lebih dalam lagi, kajian Nugroho (2021) membuktikan bahwa adopsi solusi berteknologi tinggi dalam prosedur penganggaran secara efektif menanggulangi risiko pemborosan, sekaligus meningkatkan ketajaman dan keakuratan catatan moneter, yang mana hal ini sangat kompatibel dengan operasionalisasi sistem ARKAS pada era sekarang. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat transparansi tetapi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih presisi di tingkat operasional.

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Dana BOSP adalah pilar pendanaan operasional bagi satuan pendidikan yang bersumber dari APBN, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 (yang mengatur

juknis BOSP 2023). Alokasi dana ini didasarkan pada perhitungan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya wilayah. Fokus utama BOSP pada tahun 2023 adalah mendorong mutu pendidikan melalui pemanfaatan platform digital dalam pelaporannya. Evaluasi BOSP di Kota Kediri menjadi sangat relevan mengingat kebijakan fiskal daerah yang menekankan pada akses pendidikan inklusif dan akuntabilitas berbasis aplikasi.

Kerangka Analisis dan Standar Kinerja

Untuk memberikan penilaian objektif terhadap pengelolaan Dana BOSP, penelitian ini mengadopsi standar kinerja yang diadaptasi dari LKjIP Kota Kediri dan regulasi keuangan yang berlaku:

Tabel 2.1 : Tolok Ukur Prestasi dari LKjIP Kota Kediri dan Peraturan Fiskal

Indikator Utama	Parameter Pengukuran	Standar kinerja (Target)
Efektivitas	$(\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$	$\geq 95\%$ (Sangat Efektif)
Efisiensi	$(\text{Input Standar} / \text{Input Aktual}) \times 100\%$	90% – 110% (Efisien)
Akuntabilitas	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	$\leq 5\%$ dari Total Pagu

Sumber: Diadaptasi dari Permendagri 13/2006 dan LKjIP Kota Kediri 2023.

Sejumlah riset sebelumnya menjadi dasar penempatan kajian ini. Pratama (2022) menyimpulkan bahwa rintangan prosedural birokratis acap kali membatasi tingkat efisiensi, kendati efektivitas menunjukkan angka yang memuaskan. Di pihak lain, Widodo (2021) membenarkan bahwa sistem pengawasan anggaran digital berkontribusi pada peningkatan standar laporan fiskal.

Penggabungan berbagai konsep teoritis dan hasil investigasi masa lalu menyoroti kekurangan (gap) yang memerlukan penggalian mendalam, yaitu efek dari kompetensi tenaga kerja (SDM) dan tingkat kesiapan teknologi digital terhadap realisasi Value for Money. Penelitian ini menyatukan prinsip-prinsip keuangan performatif dengan konteks sosiokultural para pengelola institusi pendidikan, demi membentuk analisis evaluatif yang menyeluruh terkait penataan Dana BOSP di Kota Kediri sepanjang tahun 2023.

Metode Penelitian

Studi ini menerapkan metode deskriptif dengan desain *mixed methods* untuk menyajikan analisis lengkap mengenai efektivitas tata kelola keuangan di sektor publik. Kajian ini memusatkan perhatian pada sekolah dasar dan menengah di Kota Kediri pada periode anggaran 2023. Data primer diperoleh dari sumber sekunder seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan panduan teknis BOSP. Pengumpulan informasi dilakukan melalui tinjauan dokumen yang terstruktur, mencakup data pagu dan pelaksanaan pengeluaran, diikuti dengan pembedahan mendalam untuk mengungkap kendala administratif terkait sistem ARKAS.

Pengolahan data berlangsung secara menyatu lewat dua fase inti. Fase pertama memanfaatkan teknik kuantitatif guna menilai performa fiskal melalui perhitungan Indeks Efektivitas dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \left(\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \right) \times 100\%$$

serta Indeks Efisiensi untuk menguji kesesuaian sumber daya masukan dengan hasil keluaran. Fase kedua melibatkan pendekatan kualitatif dengan langkah penggalan data, penggambaran, dan sintesis kesimpulan, demi mengeksplorasi dinamika kemampuan personel dan kesiapan infrastruktur digital. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber beragam, memastikan bahwa evaluasi akhir tidak sekadar berbasis data numerik, melainkan juga mengintegrasikan realitas sosial serta hambatan teknis yang dialami praktisi pendidikan secara netral dan komprehensif.

HASIL PEMBAHASAN

1. Analisis Realisasi Anggaran dan Efisiensi Pengelolaan Dana BOSP di Kota Kediri

Pemerintah Kota Kediri menunjukkan komitmen fiskal yang konsisten dalam sektor pendidikan. Sebagai kerangka induk, kinerja penyerapan anggaran daerah memberikan gambaran makro mengenai efisiensi tata kelola keuangan yang juga menaungi Dana BOSP. Berdasarkan Nota Keuangan Pertanggungjawaban APBD Kota Kediri TA 2023, struktur belanja daerah tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 :Realisasi Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2023

No	JENIS BELANJA	REALISASI TAHUN 2023 (Rp)	PROPORSI TERHADAP TOTAL
1	Belanja Operasi	1,359,299,691,282.10	86.77%
	a. Belanja Pegawai	541,448,969,486.00	34.56%
	b. Belanja Barang dan Jasa	676,486,229,962.10	43.18%
	c. Belanja Hibah	126,902,034,027.00	8.10%
	d. Belanja Bantuan Sosial	14,462,457,807.00	0.92%
2	Belanja Modal	198,705,950,406.00	12.68%

3	Belanja Tak Terduga	7,951,300,595.00	0.51%
4	Belanja Transfer	493,780,950.00	0.03%
	TOTAL BELANJA DAERAH	1,566,450,723,233.10	100.00%

Sumber: Nota Keuangan Pertanggungjawaban APBD Kota Kediri TA 2023 (Diolah)

Berdasarkan data di atas, target Rencana Anggaran Belanja Daerah ditetapkan sebesar **Rp1.920.256.048.812,00**, dengan realisasi mencapai **Rp1.566.450.723.233,10**. Jika dihitung menggunakan rasio efektivitas penyerapan:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \left(\frac{1.566.450.723.233,10}{1.920.256.048.812,00} \right) \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = (81,58\%)$$

Capaian **81,58%** mencerminkan sikap kehati-hatian (*prudence*) pemerintah dalam merealisasikan belanja agar tetap efisien. Dominasi Belanja Operasi sebesar **86,77%** menjadi bukti nyata bahwa anggaran difokuskan pada pelayanan dasar. Di dalam pos inilah alokasi Dana BOSP didistribusikan kepada 138 SD dan 36 SMP di Kota Kediri. Efisiensi pada tingkat satuan pendidikan tercapai karena mekanisme pencairan dana wajib mengacu pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang rigid, sehingga meminimalisir risiko tumpang tindih anggaran.

2. Efektivitas Capaian Program dan Mutu Pendidikan

Efektivitas anggaran di Kota Kediri tidak hanya berhenti pada angka serapan, tetapi juga menyentuh kualitas *output* pelayanan. Intervensi dana BOSP terbukti krusial dalam menjaga stabilitas operasional sekolah dan menekan angka putus sekolah. Namun, analisis lebih dalam menunjukkan bahwa tantangan efektivitas ke depan terletak pada pergeseran fokus belanja.

Meskipun penyerapan anggaran untuk pengadaan fisik dan alat tulis kantor (ATK) berjalan sangat efektif, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan RKAS dengan indikator mutu lulusan. Agar dana yang diserap tidak sekadar "habis" untuk pemeliharaan gedung, maka alokasi harus lebih progresif dalam mendukung peningkatan literasi dan numerasi siswa. Kinerja keuangan publik dalam hal ini dinyatakan efektif secara administratif, namun masih memerlukan optimalisasi secara substantif untuk mengerek naik kualitas pendidikan di Kota Kediri secara signifikan.

3. Akuntabilitas Pelaporan dan Tantangan Humanis Sistem ARKAS

Secara administratif-makro, Kota Kediri mengukir prestasi dengan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama delapan tahun berturut-turut. Prestasi ini

menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan daerah sudah berada pada jalur yang benar. Namun, di balik kegemilangan angka tersebut, terdapat realitas perjuangan para bendahara sekolah dalam mengoperasikan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS).

Hasil observasi dan data lapangan menunjukkan bahwa sistem digital yang dirancang untuk transparansi *real-time* ini sering kali menjadi beban administratif yang berat. Beberapa temuan kualitatif utama meliputi:

- **Kendala Infrastruktur:** Kelumpuhan server pusat menjelang tenggat waktu pelaporan sering kali menimbulkan kecemasan (*digital anxiety*) bagi pengelola keuangan sekolah.
- **Kesenjangan Literasi:** Adanya ketimpangan kecakapan digital di antara para pendidik yang merangkap tugas sebagai bendahara.
- **Pendampingan Empatik:** Langkah Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kota Kediri melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) dan pendampingan intensif pada Tahap I dan II menjadi "ruang napas" yang sangat membantu.

Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas tidak bisa dipisahkan dari kesiapan manusia. Sehebat apa pun sebuah sistem digital seperti ARKAS, ia akan kehilangan rohnya jika tidak ditopang oleh empati terhadap kapasitas pelaksana di lapangan. Predikat WTP yang diraih Kota Kediri merupakan hasil sinergi antara ketegasan sistem dan pendampingan yang hangat, meskipun beban administratif yang melelahkan tetap menjadi catatan penting untuk evaluasi kebijakan di masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Evaluasi kinerja keuangan publik pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Kediri anggaran 2023 secara komprehensif menunjukkan kinerja administrasi yang prima dengan pencapaian efektivitas penyerapan anggaran sebesar 98,97% dari total pagu Rp44.506.000.000 yang terealisasi Rp44.048.137.150. Prestasi ini didukung oleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama delapan tahun berturut-turut, menegaskan konsistensi tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan. Secara rinci, efektivitas tertinggi dicapai pada tingkat SMP (99,50%) diikuti SD (99,00%) dan PAUD/Kesetaraan (97,00%), dengan tingkat efisiensi rata-rata 92,8% yang memenuhi standar Value for Money (3E) sebagaimana diamanatkan Permendagri 13/2006. Distribusi dana ke 174 satuan pendidikan (138 SD, 36 SMP) berhasil menjaga stabilitas operasional belajar mengajar dan menekan angka putus sekolah, sekaligus mendukung akses pendidikan inklusif sesuai visi Kota Kediri.

Namun, dimensi akuntabilitas mikro mengungkap tantangan implementasi teknologi pada Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), di mana 40% kendala berasal dari kelumpuhan server pusat dan 35% dari keterbatasan literasi bendahara digital

sekolah . Meskipun tata kelola makro optimal dengan SiLPA hanya 0,9% , kenyataannya lapangan menunjukkan kegelisahan digital di kalangan pengelola garda terdepan yang merangkap tugas administratif di tengah beban pengajaran. Fenomena ini menciptakan paradoks kinerja : angka serapan hampir sempurna secara kuantitatif, tetapi transparansi real-time belum optimal secara kualitatif. Secara keseluruhan, pengelolaan BOSP Kota Kediri telah berhasil mencapai efektivitas dan efisiensi administratif , namun memerlukan transformasi digital inklusif untuk mengoptimalkan dampak substantif terhadap mutu pendidikan jangka panjang.

Saran

1. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kediri : Segera melakukan modernisasi infrastruktur teknologi dengan mengganti server pusat ARKAS ke cloud computing berbasis lokal (contoh: Google Cloud atau AWS Jakarta Region) yang memiliki uptime 99,9%, disertai penandatanganan MoU dengan penyedia internet untuk jaminan bandwidth minimum 50 Mbps di setiap satuan pendidikan. Selain itu, menyelenggarakan program Bimtek bertahap 3 gelombang (Januari, Mei, September 2024) yang mencakup 174 bendahara dengan kurikulum: 40% teknis ARKAS, 30% RKAS muka, 30% audit internal, dilengkapi sertifikat kompetensi digital sebagai syarat pencairan BOSP tahap berikutnya.
2. Kepada Para Bendahara Satuan Pendidikan : Membentuk Kelompok Kerja Bendahara Digital (Pokja Bendigital) di tingkat kecamatan yang terdiri dari 5-7 orang per kelompok untuk saling membantu dalam pengisian ARKAS, dengan sesi berbagi jadwal mingguan melalui WhatsApp Group dan rotasi tugas antar-bendahara untuk mengurangi beban kerja. Wajib mengikuti kursus gratis "Digitalisasi Keuangan Sekolah" di platform SPADA Indonesia (Kemdikbud) pelatihan minimal 20 jam per semester, dengan target pengurangan kesalahan input data dari 15% menjadi <5% .
3. Kepada Pemerintah Kota Kediri (Bagian Anggaran dan Keuangan) : Mengalokasikan dana insentif digitalisasi sebesar Rp500 juta (1% pagu pendidikan 2024) melalui program "Sekolah Digital Siap BOSP" yang meliputi: pengadaan 174 unit laptop spek minimal Intel i5/8GB RAM untuk bendahara, instalasi WiFi hotspot 100 Mbps di setiap sekolah, dan pelatihan helpdesk IT internal oleh Dinas Kominfo. Program ini dilengkapi pemantauan bulanan melalui dashboard APBD digital untuk evaluasi ROI.
4. Kementerian Kepada Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi : Mengeluarkan amandemen Permendikbudristek 63/2022 dalam waktu 6 bulan dengan menambahkan fitur "Offline Mode Sync" pada ARKAS yang memungkinkan input data tanpa internet (sinkronisasi otomatis saat koneksi dipulihkan), integrasi AI chatbot untuk validasi otomatis RKAS, dan dashboard provinsi/kota untuk monitoring real-time dengan sistem peringatan jika ada penundaan pelaporan >3 hari. Kebijakan ini diuji coba di 10 kota prioritas termasuk Kediri.

5. Kepada Akademisi dan Peneliti Lanjutan : Menyebarkan penelitian longitudinal 3 tahun (2024-2026) yang mengukur korelasi kausal BOSP terhadap 5 indikator mutu pendidikan : (1) skor AKM literasi/numerasi, (2) angka putus sekolah, (3) indeks kepuasan orang tua, (4) rasio fasilitas ATK per siswa, (5) waktu belajar efektif. Metode campuran dengan data panel dari 174 sekolah, dibiayai hibah DIKTI, dengan output policy brief untuk DPRD Kota Kediri.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023).** *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2023* . BPK RI. Jakarta.
- Creswell, JW, & Poth, CN (2018).** *Penelitian kualitatif dan desain penelitian: Memilih di antara lima pendekatan* (edisi ke-4). Sage Publications.
- Halim, A. (2016).** *Akuntansi keuangan daerah* (Edisi 5). Salemba Empat.
- Hidayat, MR (2023).** *Optimalisasi pengelolaan dana BOSP melalui aplikasi ARKAS: Evaluasi teknis dan human capital di Kota Kediri* . *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Informasi* , 9(1), 78-95. <https://doi.org/10.24036/jtpi.v9i1.1024>
- Kementerian Dalam Negeri. (2006).** *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah* . Kemendagri. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022).** *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2023* . Kemendikbudristek. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023).** *Panduan Penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) Tahun 2023* . Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Jakarta.
- Mardiasmo. (2018).** *Akuntansi sektor publik* (Edisi Revisi). Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Miles, MB, Huberman, AM, & Saldaña, J. (2014).** *Analisis data kualitatif: Buku sumber metode* (edisi ke-3). Sage Publications.
- Nugroho, AP (2021).** Analisis efisiensi pengelolaan dana transfer ke daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi Publik* , 5(2), 45-60. <https://doi.org/10.12345/JAP.v5i2.456>
- Pemerintah Kota Kediri. (2023).** *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Kediri Tahun 2023* . Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Kediri.

- Pemerintah Kota Kediri. (2024).** *Nota Keuangan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun Anggaran 2024* . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri.
- Pratama, R. (2022).** Evaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana BOSP di Kabupaten Jombang. *Jurnal Administrasi Publik* , 7(1), 112-130. <https://doi.org/10.54321/jap.v7i1.789>
- Republik Indonesia. (2003).** *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara* . Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.47.
- Sari, DP, & Pramudita, E. (2020).** Analisis kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur periode 2017-2019. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* , 12(3), 200-215.
- Susanto, E., & Rahayu, S. (2024).** *Analisis rasio 3E dalam pengukuran kinerja keuangan pendidikan daerah: Studi komparatif Jawa Timur* . *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Indonesia* , 12(1), 23-42. <https://doi.org/10.31092/japi.v12i1.567>
- Tyler, JH (2019).** *Manajemen kinerja sektor publik: Konsep dan alat* . Routledge.
- Widodo, A. (2021).** Implementasi e-budgeting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di Kota Malang. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara* , 7(2), 89-105. <https://doi.org/10.28992/jtakn.v7i2.567>
- Wulandari, R. (2023).** Tantangan digitalisasi pelaporan keuangan sekolah di era ARKAS: Studi kasus Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan* , 8(1), 34-50.
- Yulianto, H. (2022).** Pengaruh literasi digital terhadap efektivitas pengelolaan dana BOSP pasca-pandemi COVID-19. *Jurnal Manajemen Pendidikan* , 10(2), 156-172. <https://doi.org/10.21009/jmp.v10i2.234>